

Pembangunan sosial ekonomi, perubahan demografis dan urbanisasi: Suatu telaah empirik di Indonesia, 1971 -1985

Sarungu, Julianus J., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82601&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi dan demografi yang berpengaruh dominan terhadap proses urbanisasi, mempelajari hubungan faktor-faktor tersebut dengan urbanisasi, dan mengungkapkan jalur mekanisme pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap urbanisasi. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan kasus Indonesia selama kurun waktu pembangunan 1971-1985.

Rerangka pikiran yang dikembangkan dalam hal ini bertumpu pada apa yang disebut "Hipotesa Karakteristik' (characteristic Hypothesis) yang menyatakan bahwa proses urbanisasi yang berbeda di berbagai wilayah/region merupakan manifestasi perbedaan perubahan komponen demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi neto baik antar maupun dalam wilayah). Namun, dibalik semua perbedaan itu adalah perbedaan perubahan faktor-faktor sosial ekonomi masing-masing wilayah serta kebijakan pembangunan masa yang lalu.

Secara empiris, kerangka pikiran/teoritis tersebut kemudian diperinci ke dalam hubungan antar peubah-peubah bebas dan peubah tak bebas. Peubah-peubah bebas yang ditentukan secara selektif berdasarkan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu meliputi: (1) Peubah-peubah ekonomi: Pendapatan Regional Per Kapita (PPK), Kesempatan Kerja Pertanian (KRP) dan Peranan Sektor Manufaktur Daerah Secara Nasional (PMDN); (2) Peubah-peubah Sosial: Angka Literasi (LIT), Rasio Wanita Usia Subur Tamat SLTA+ (WUSS) dan Angka Kematian Bayi (AKB); (3) Peubah-peubah Demografi: Angka Fertilitas Total (ART), Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai peubah proksi terhadap mortalitas dan Angka Migrasi Antar Provinsi, baik migrasi masuk (MMA) maupun migrasi keluar (MKAP);(4) Peubah-peubah Situasional: Wilayah Urbanisasi (WU), Wilayah Kebijakan Pembangunan (WP) dan Waktu/Tahun (T). Semua peubah tersebut merupakan peubah kategori (dummy variable). Sedang peubah tak bebas adalah tingkat atau derajat urbanisasi (DURB), yaitu proporsi penduduk yang tinggal menetap di daerah perkotaan.

Hubungan antar peubah tersebut dianalisis dengan menggunakan peralatan statistik regresi linear berganda (multiple linear regression model) berdasarkan data dari 24 propinsi yang dipublikasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada tiga titik waktu/tahun (1971, 1980 dan 1985). Dengan demikian, analisis data meliputi 72 observasi (cases). Dalam hal ini, masing-masing propinsi diperlakukan sebagai satuan analisis (unit of analysis). Data gabungan (the pooled data) ini diproses dengan menggunakan program komputer Statistical Analysis System (SAS Program) di Laboratorium Komputer Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Beberapa hasil temuan dari pengolahan data tersebut dapat di sebutkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Peubah Demografi Dengan Urbanisasi.

Peubah demografi yang berpengaruh dominan terhadap urbanisasi adalah angka kelahiran total/fertilitas dan usia harapan hidup, sedang migrasi antar daerah/propinsi baik migrasi masuk maupun migrasi keluar tidak berpengaruh. Fertilitas menunjukkan pengaruh negatif terhadap urbanisasi. Rasionalisasi yang sering diajukan mengenai hal ini adalah fertilitas pada umumnya lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan. Akibatnya, pertumbuhan penduduk pedesaan lebih pesat dibanding pertumbuhan penduduk perkotaan. Sedang usia harapan hidup sebagai proksi mortalitas menunjukkan pengaruh yang negatif pula terhadap urbanisasi. Meningkatnya usia harapan hidup dapat menggambarkan penurunan mortalitas. Oleh karena itu, hubungan tersebut di atas dapat menunjukkan terjadinya penurunan angka kematian di daerah pedesaan yang lebih drastis dibanding di daerah perkotaan dan mengakibatkan pertumbuhan penduduk pedesaan lebih tinggi dibanding dengan di daerah perkotaan. Berdasarkan arah perubahan fertilitas dan mortalitas tersebut, maka perubahan keduanya secara bersamaan akan cenderung meningkatkan pertumbuhan penduduk alami di pedesaan lebih pesat dibanding di daerah perkotaan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan peubah lainnya maka urbanisasi cenderung menurun.

Migrasi antar daerah/propinsi baik migrasi masuk maupun migrasi keluar ternyata tidak berpengaruh terhadap urbanisasi. Hal ini nampaknya tidak terlepas dari masih rendahnya mobilitas penduduk antar daerah/propinsi dan mobilitas yang rendah tersebut berlangsung menuju hanya ke daerah tertentu, yaitu DKI Jakarta dan Lampung. Hal ini memberikan kesan yang kuat bahwa migrasi dalam daerah (migrasi desa-kota) nampaknya lebih berperan dalam proses urbanisasi.

2. Pengaruh Peubah Sosial Ekonomi Dengan Urbanisasi.

Peubah literasi, ratio wanita usia subur yang berpendidikan tinggi dan angka kematian bayi ternyata tidak berpengaruh terhadap urbanisasi meskipun literasi menunjukkan pengaruh terhadap kelahiran, kematian dan migrasi serta ratio wanita usia subur yang berpendidikan tinggi berpengaruh terhadap kelahiran. Sedang peubah-peubah ekonomi ternyata menunjukkan pengaruh terhadap urbanisasi. Dengan demikian, peubah-peubah ekonomi menunjukkan pengaruh yang lebih dominan terhadap urbanisasi dibandingkan dengan peubah-peubah sosial. Nampaknya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari aplikasi strategi pembangunan yang lebih menekankan bidang ekonomi.

Pendapatan per kapita menunjukkan pengaruh positif terhadap urbanisasi. Pendapatan per kapita yang meningkat dapat merupakan refleksi meningkatnya produktifitas sebagai akibat kemajuan teknologi dan akumulasi modal baik modal fisik maupun modal manusia. Peningkatan tersebut pada gilirannya akan mendorong perubahan struktural perekonomian dan demografis antara lain komposisi penduduk dan alokasi kesempatan kerja baik antar sektor (pertanian dan bukan pertanian) maupun antar daerah (daerah perkotaan dan daerah pedesaan). Pada umumnya, akumulasi modal dan aplikasi teknologi lebih berorientasi ke daerah perkotaan karena luasnya pasar produk. Oleh karena itu, daerah perkotaan cenderung berfungsi sebagai pusat aktifitas sosial ekonomi yang akan menjadi daya tarik kuat bagi berbagai sumberdaya ekonomi termasuk sumber daya manusia. Sementara itu, aplikasi teknologi pertanian di pedesaan cenderung bersifat menghemat pekerja. Akibatnya, mobilitas penduduk ke daerah perkotaan semakin meningkat dan urbanisasi akan meningkat pula. Selain itu, meningkatnya pendapatan per kapita dapat pula merefleksikan

meningkatkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini berarti kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup secara fisik dan pengetahuan akan meningkat pula. Peningkatan tersebut cenderung mendorong kelahiran tetapi akan menekan kematian relatif drastis terutama di daerah pedesaan. Akibatnya, pertumbuhan penduduk daerah pedesaan akan lebih pesat dibanding dengan di daerah perkotaan dan karena itu urbanisasi akan cenderung menurun. Jadi, jika pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap urbanisasi maka hal ini menunjukkan bahwa pengaruh peningkatan pendapatan per kapita tersebut lebih dominan melalui perubahan migrasi daripada melalui perubahan kelahiran dan kematian.

Kesempatan kerja pertanian berpengaruh negatif terhadap urbanisasi. Meningkatnya (menurunnya) kesempatan kerja pertanian di daerah pedesaan cenderung menghambat (mendorong) migrasi desa-kota. Hal ini berarti pula menghambat (mendorong) urbanisasi. Peningkatan atau penurunan kesempatan kerja pertanian di daerah pedesaan sangat ditentukan oleh penerapan teknologi pertanian/mechanisasi, usaha komersialisasi pertanian dan ketimpangan pemilikan tanah pertanian. Terdapat kecenderungan bahwa pembangunan pertanian yang lebih mengarah ke mekanisasi pertanian, kurang komersial dan lebih mendorong ketimpangan pemilikan tanah pertanian akan menyebabkan menurunnya kesempatan kerja pertanian. Keadaan ini akan mendorong migrasi baik secara sektoral maupun secara spasial (migrasi desa-kota) dan pada gilirannya akan mendorong urbanisasi lebih pesat. Demikian pula sebaliknya.

Peranan sektor manufaktur berpengaruh negatif terhadap urbanisasi. Hubungan tersebut dapat terjadi bilamana tingkat industrialisasi masih relatif rendah, industri manufaktur bersifat padat modal, berorientasi ekspor, dan umumnya berlokasi di daerah pedesaan sehingga industri manufaktur kurang (tidak) berkaitan dengan arus mobilitas penduduk dari daerah pedesaan ke daerah per kotaan.

3. Urbanisasi Dan Ketimpangan wilayah/daerah.

Berdasarkan pembagian wilayah Indonesia menjadi tiga wilayah kebijakan pembangunan yaitu Wilayah Indonesia bagian barat, Wilayah Indonesia bagian tengah dan Wilayah Indonesia bagian timur, maka hasil empirik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat dan perubahan urbanisasi yang bermakna secara statistik di ketiga wilayah tersebut. Tingkat dan perubahan urbanisasi di wilayah Indonesia bagian timur lebih rendah dan lambat dibanding dengan di wilayah Indonesia lainnya. Ada kecenderungan semakin ke arah barat wilayah Indonesia, urbanisasi semakin pesat.

Perbedaan-perbedaan tersebut, sesungguhnya menunjukkan pula adanya perbedaan kreatifitas sosial ekonomi di wilayah tertentu dan prioritas kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ke wilayah Indonesia bagian barat. Dari segi ini, ternyata variasi urbanisasi di berbagai daerah atau wilayah menunjukkan pula ketimpangan sosial ekonomi dan demografis antar daerah atau wilayah (ketimpangan wilayah).

4. Implikasi kebijakan.

Setelah memperhatikan berbagai hubungan antar peubah-peubah sosial ekonomi dan demografi dengan urbanisasi serta gambarnya menurut wilayah kebijakan pembangunan maka perlu diupayakan suatu kebijakan perangsang urbanisasi, terutama di wilayah atau daerah di mana tingkat dan tempo urbanisasi sangat rendah dan lambat, seperti di Wilayah Indonesia bagian timur atau di daerah tertentu di wilayah

Indonesia lainnya. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan sosial ekonomi dan demografi yang pelaksanaannya hendak nya diintegrasikan diantara pengembangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan dan diantara pengembangan wilayah pembangunan yang satu dengan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong realokasi berbagai sumberdaya pembangunan, termasuk sumberdaya manusia dan teknologi secara optimal ke wilayah pembangunan atau daerah yang derajat urbanisasinya masih relatif rendah.

Berbagai program pembangunan perlu dilaksanakan atau lebih diintensifkan untuk mendukung kebijakan tersebut diatas, antara lain: pengembangan kota sedang dan kecil baik fisik maupun sosial ekonomi di berbagai wilayah; pengembangan industri sedang dan kecil serta industri kerajinan di daerah pedesaan disamping peningkatan kegiatan bidang pertanian; peningkatan pengetahuan masyarakat terutama di daerah pedesaan, terutama yang berkaitan dengan aspek demografi (fertilitas, mortalitas dan migrasi) dan kualitas sumberdaya manusia; peningkatan dan pemerataan informasi dan fasilitas pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah atau daerah yang semakin intensif.

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate social economic and demographic factors which have dominant influences on urbanization and to examine the mechanism by which those factors have influenced urbanization over the development period of 1971-1965.

The theoretical framework is based on The Characteristic Hypothesis, which states that the varied levels and tempos of urbanization among regions reflect differential changes in demographic components (fertility, mortality and net migration) aid government policies of settlement. Underlying these differentials are differences in socioeconomic conditions and development.

Selected independent variables are classified into: (i) economic variables, which include regional income per capita (PPK) agricultural employment (KKP) and the national share of local manufacture sector (PMDN); (ii) social variables, which consist of the literacy rate (LIT), the highest education attained by women aged 15 to 49 (reproductive ages/WUSS) and the infant mortality rate (AKB) as a proxy for social health conditions; (iii) demographic variables, such as the total fertility rate (AKT), life expectancy (UHH), the interprovince in - and out - migration rate (MMAP and MKAP); (iv) situational variables, e.g urbanization regions (WU), development policy of the region (WP) and time/years (T), all of which are used as dummy variables; and (v) the policy variable, which is presented by the percentage of urban-village (desa-perkotaan) as a proxy for reclassification. The dependent variable is the level or degree of urbanization (DURB), i.e. the proportion (percentage) of population living in urban areas.

The Multiple linear regression is used for studying and testing the relationships of these variables. The sample set is a set of secondary data of 24 provinces over three years 1971, 1988' and 1985. In short the sample consists of 72 observations. In this study, each province represents a unit of analysis. The data were collected and published by Biro Pusat Statistik (The Central Bureau of Statistics/BPS). The pooled data was processed by using the computer programmed "Statistical Analysis System" (SAS) at the Demographic Institute Laboratory, the Faculty of Economics, the University of Indonesia.

The empirical results may be summarized as follows :

1. The Relationship between demographic variables and Urbanization.

The demographic variables which have dominant influences on urbanization are the Total fertility rate and the Life expectancy rate, while the interprovince in- and out-migration rate has no influence on urbanization. The logical and common explanation for this matter which is often put forward is that fertility in the rural areas is generally higher than in the urban areas, and consequently, the growth of the rural population is more rapid than the growth of the urban population. At the same time, the life expectancy rate as a proxy for the mortality rate also indicates a negative influence on urbanization. The increasing of life expectancy points to the reducing of mortality. Therefore, the above relationship shows that the mortality rate in rural areas is decreasing more drastically than the mortality rate in urban areas, and as a result, the increase of the rural population is higher than the increase of the urban population. Based on this tendency of fertility and mortality, these two changes will equally tend to increase the natural of population growth in the rural areas more rapidly than in the urban areas. Therefore, considering the other variables, urbanization is tending to decrease.

Interprovince migration, both in- and out-migration, obviously has no influence on urbanization. This evidently can not be separated from the low mobility of people between regions/provinces and migration continues to go toward certain provinces, i.e., the Jakarta Metropolitan Area and Lampung. This gives the strong 'impression that intra-province migration (rural-urban migration) obviously plays a part in the urbanization's process.

2. The Relationship between Social-Economic Variables and Urbanization.

The Literacy rate, the educational attainment of women of reproductive ages, and the infant mortality rate obviously have no influence on urbanization although literacy indicates an influence on fertility, mortality and migration; and the educational attainment of women of reproductive ages only influences the fertility rate. At the same time, all economic variables show a significant influence on urbanization. Thus, economic variables have a more dominant influence than social variables on the urbanization process. This is a logical consequence of the application development strategy which has emphasized on the economic field.

Income per capita shows a positive influence on urbanization. The increasing of income per capita can be a reflection of the increasing of productivity as a result of technological progress and capital accumulation, both physical and human capital. In turn, this increase will influence the change of the economic and demographic structure, i.e., population composition and allocation of employment, both from inter sectors (agriculture and non agriculture) and inter-regions.

Generally, capital accumulation and technological application tend to be concentrated in urban areas because these areas have a wide product market. Therefore, urban areas tend to function as a center for social economic activities which will strongly attract economic resources, including human resources, while the application of agricultural technology in rural areas tends to save on labor. Consequently, the movement of people to urban areas is increasing and urbanization, of course, will also increase. The increasing of income per capita also reflects the increase in the social economic condition of people, which means that the

ability of the people to increase their standard of living physically and in term of skills is improving. This increases tend to stimulate the fertility, but it will suppress the mortality rate somewhat drastically, especially in rural areas.

As a consequence, the population in the rural areas will increase more rapidly than in the urban areas, and therefore urbanization will tend to be reduced. Thus, if income per capita has a positive influence on urbanization, this indicates that the influence is more dominant through the change of migration (rural-urban migration).than the change of fertility and mortality.

Increased agricultural employment has a negative influence on urbanization and vice versa. The increasing of agricultural employment in rural areas tends to decrease the rural-urban migration, and this means decreased urbanization. The increasing of agricultural employment in rural areas is caused by the application of agricultural technology (mechanization), commercialized efforts in the agricultural sector, and the imbalance of farm ownership. Agricultural development means agricultural mechanization, fewer commercialized efforts and the-imbalance of the farm ownership which causes the reduction of agricultural employment. This condition will stimulate migration, both in inter-sectors and in spatial regions (rural-urban migration), and in turn it will stimulate more rapid urbanization.

The role of the manufacturing sectors has a negative influence on urbanization. This relationship can exist if the industrialization level is still relatively low, and the manufacturing industry is more capital intensive, more export oriented, and generally located in rural areas. Under such condition the manufacturing industry has little relationship to people's mobility from rural areas to urban areas.

3. Urbanization and The Imbalance of Regions.

Based on the division of Indonesian regions which is divided into three development policy regions (the Western Indonesia Region, the Central Indonesia Region and the Eastern Indonesia Region), empirical results show there are differences in the level and growth rate of urbanization in these three regions. The level and growth rate of urbanization in the Eastern region is lower than in the other regions. There is a tendency that the more westernly the region is, the higher and more rapid urbanization is.

This facts actually shows the differences between social economic activities in a certain region and the priority of development policy given to the Western region. From this aspect, the differences in urbanization in the various region shows an imbalance between social economic development and demographic changes among the regions.

4. The Policy Implications.

Having observed the various relationships between social economic and demographic variables and urbanization and the description of regional policy, it is necessary to try to make policies which stimulate the urbanization process, especially in the-se regions where the level and rate of growth of urbanization are low and slow, such as in the Eastern Indonesian region or certain areas of the other Indonesian regions. It is the social economic and demographic policies which must be carried out to find a balance between the development of the urban and rural areas, and between the development of one region and the others. The

policies must be able to optimally stimulate reallocation of the various development resources, including human resources and technology, to develop areas which have a low level and rate of growth urbanization.

Various development programs which are necessary to intensify and to support the above mentioned policies, are as follows: the development of small and medium sized cities, both in physical and social economic aspects in the various regions; the development of small and medium sized industries, especially in rural areas, besides an increase of the agriculture sector; the increase of people's skill, especially those which have a relation with demographic aspects (fertility, mortality and migration), and the quality of human resources; a more intensive increase and equalization of information, educational and health facilities in the various regions.